

# **IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 21 MALANG**

## **TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**



**Disusun oleh :**

**IKA RAHMANIA  
NIM : 201720240211023**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
Februari 2020**

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN  
DI SMP NEGERI 21 MALANG

Diajukan oleh :

IKHA RAHMANIA

201720240211023

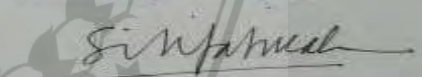
Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Selasa, 19 Februari 2020

Pembimbing Utama

  
Dr. Radiono, M.Si

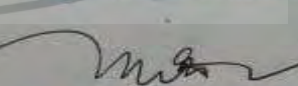
Pembimbing Pendamping

  
Dr. Siti Fatimah Soenaryo M.Pd.

Direktur  
Program Pascasarjana

  
Prof. Akhsanul In'am, Ph.D

Ketua Program Studi  
Magister Kebijakan dan  
Pengembangan Pendidikan

  
Dr. Agus Tintis, M.Pd.

# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

IKA RAHMANIA

**201720240211023**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, **Jum'at / 20 Januari 2020**  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Budiono, M.Si

Sekretaris : Dr. Siti Fatimah Soenaryo, M.Pd

Penguji I : Dr. Lud Waluyo, M.Kes

Penguji II : Dr. Agus Tinus, M.Pd

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Ika Rahmania**  
NIM : **201720240211023**  
Program Studi : **Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul **:IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 21 MALANG.** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Januari 2020

Yang menyatakan,

**Ika Rahmania**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Smp Negeri 21 Malang”**, dengan baik.

Penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari arahan dan bantuan berbagai pihak serta bimbingan dan doa yang diberikan kepada penulis. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Akhsanul In'am, Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Agus Tinus, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan.
3. Bapak Dr. Budiono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya dalam memberikan bimbingan Tesis sampai pada tahap akhir.
4. Ibu Dr. Siti Fatimah Soenaryo, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya dalam memberikan bimbingan Tesis sampai pada tahap akhir.
5. Kedua orang tua, suami dan keluarga penulis yang telah memberikan doa dan dukungannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa dan seluruh kawan-kawan yang telah memberikan kontribusinya terhadap penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kata sempurna, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan Tesis ini. Akhir kata, semoga Laporan Tesis ini dapat berguna bagi rekan-rekan mahasiswa.

Malang, 16 Januari 2020

Penulis

## ABSTRAK

Rahmania, Ika. 2020. *Implementasi SPMI dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 21 Malang*. Tesis. Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: 1) Dr. Budiono, M.Si. (0016036102); 2) Dr. Siti Fatimah Soenaryo, M.Pd. (0019115302)  
i3\_ka@yahoo.co.id

Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengkaji implementasi SPMI, mengkaji hasil implementasi SPMI dan mengkaji faktor-faktor penghambat implementasi SPMI di SMP Negeri 21 Malang sebagai usaha meningkatkan mutu pendidikan. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang menggambarkan status fenomena yang dikategorisasi untuk memberikan gambaran dalam memperoleh kesimpulan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pelaksana SPMI yaitu kepala sekolah dan tim penjaminan mutu di SMP Negeri 21 Malang. Adapun data sekunder diperoleh dari referensi, buku dan dokumen yang berhubungan dengan implementasi SPMI. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa implementasi SPMI di SMP Negeri 21 Malang terdokumentasi sejak tahun 2016 sampai 2019. Implementasi SPMI melibatkan seluruh komponen sekolah dari pucuk pimpinan sampai bawah. Implementasi SPMI diawali dari pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, implementasi pemenuhan mutu, evaluasi dan penetapan standar berjalan dengan baik. Keberhasilan implementasi SPMI mengalami peningkatan yang dibuktikan dengan lulusan tahun 2019 mendapatkan peringkat ke-4 hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Implementasi mutu telah menjadi budaya dan karakter yang berpengaruh terhadap kualitas lulusan SMP Negeri 21 Malang. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam pengimplementasian sistem penjaminan mutu internal di SMP Negeri 21 Malang di antara faktor-faktor dan solusi tersebut adalah tidak adanya tenaga pustaka dan tenaga laboran yang sesuai ketentuan sehingga kedua tenaga ini dipegang oleh guru, masalah pembiayaan selama proses pemenuhan mutu, sarana dalam proses meningkatkan mutu karena tidak semua di biayai oleh pihak sekolah yang hanya mendapatkan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga sekolah berusaha untuk mencari dana dari pemerintah maupun dari pihak luar, pada proses pengisian instrumen mutu juga menjadi salah satu faktor penghambat karena dilakukan secara online dan terkadang secara teknis ada gangguan jaringan sehingga proses pengisian instrumen terganggu yang berakibat hasil rapor mutu tidak sesuai dengan kondisi di sekolah, untuk itu sekolah berusaha semaksimal mungkin pada saat pengisian instrumen dengan mengisi di awal, dan mencari waktu yang longgar agar pada saat pengisian bisa fokus.

**Kata Kunci:** implementasi SPMI, sistem penjaminan mutu internal, mutu pendidikan  
**ABSTRACT**

Rahmania, Ika. 2020. *Implementation of IQAS in Improving the Quality of Education in SMP Negeri 21 Malang*. Thesis. Master in Education Policy and Development. Muhammadiyah University of Malang. Advisor: 1) Dr. Budiono, M.Si.; 2) Dr. Siti Fatimah Soenaryo, M.Pd.

The purpose of this study is to examine the implementation of SPMI, examine the results of the implementation of SPMI and examine the factors inhibiting the implementation of SPMI in SMP Negeri 21 Malang as an effort to improve the quality of education. The method used in this study is descriptive qualitative research that describes the status of a categorized phenomenon to provide a picture in obtaining conclusions. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Primary data were obtained from the SPMI implementers, namely the school principal, supervisors and the quality assurance team at SMP Negeri 21 Malang. Secondary data were obtained from references, books and documents related to the implementation of SPMI. Data analysis techniques used in this study consisted of three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of SPMI in SMP Negeri 21 Malang is documented from 2016 to 2019. The implementation of SPMI involves all components of the school from top to bottom. The implementation of SPMI begins with quality mapping, quality fulfillment planning, implementation of quality fulfillment, evaluation and standard setting is proceeding well. The successful implementation of SPMI has increased as evidenced by graduates in 2019 getting 4th place on the results of the Computer-Based National Examination (UNBK). Implementation of quality has become a culture and character that influences the quality of graduates of SMP Negeri 21 Malang. There are several factors that become obstacles and solutions in implementing the internal quality assurance system in SMP Negeri 21 Malang among the factors and solutions are the absence of library staff and laboratory assistants in accordance with the provisions so that both of these staff are in the hands of the teacher, funding problems during the process fulfillment of quality, means in the process of improving quality because not all are funded by the school which only gets funds from the School Operational Assistance (BOS), so schools are trying to find funds from the government or from outside parties, in the process of filling out the quality instruments also becomes wrong one inhibiting factor is because it is done online and sometimes technically there is network interference so the instrument filling process is interrupted which results in a quality report card not in accordance with the conditions in the school, for that the school tries as much as possible when filling the instrument by filling out at the beginning, and looking for time the long one gar so that when charging can focus.



**Keyword:** IQAS implementation, internal quality assurance system, education quality

## **DAFTAR ISI**

<b>Halaman Cover .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Penguji .....</b>	<b>iii</b>
<b>Surat Pernyataan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>x</b>
<b>1. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>2. Kajian Teori.....</b>	<b>8</b>
2.1. Pendidikan .....	8
2.2. Mutu.....	9
2.3. Standar Nasional Pendidikan.....	11
2.4. Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	12
<b>3. Metode Penelitian .....</b>	<b>15</b>
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	15
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	15
3.3. Data dan Sumber Data .....	16
3.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	16
3.5. Analisis Data .....	17
3.6. Keabsahan Data .....	17
<b>4. Hasil Penelitian .....</b>	<b>18</b>
4.1. Implementasi Program Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Usaha Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 21 Malang.....	18
4.2. Hasil Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Usaha Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 21 Malang.....	21
4.3. Faktor Penghambat dan Solusi dari Permasalahan dalam Implementasi Program Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMP Negeri 21 Malang	24
<b>5. Pembahasan .....</b>	<b>26</b>
5.1. Pembahasan Hasil Penelitian .....	26
5.2. Implementasi Program Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Usaha Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 21 Malang .....	27
5.3. Hasil Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Usaha Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 21 Malang .....	30
5.4. Faktor Penghambat dan Solusi dari Permasalahan dalam Implementasi	



Program Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMP Negeri 21 Malang	32
<b>6. Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>35</b>
6.1. Kesimpulan .....	35
6.2. Saran .....	36
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>37</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Siklus Sistem Pejaminan Mutu Internal pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah .....	14
<b>Gambar 4.1</b> Hasil rata-rata UNBK 10 besar SMP kota Malang tahun pelajaran .....	21
<b>Gambar 4.2</b> Hasil rata-rata UNBK 10 besar SMP kota Malang tahun pelajaran 2018/2019 .....	22
<b>Gambar 4.3</b> Hasil Radar Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2018 .....	23



## **1. Pendahuluan**

Pendidikan sangat penting dalam rangka pembangunan sebuah bangsa. Sering kali pendidikan dijadikan acuan kemajuan suatu Negara. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan (Sudarsana, 2015). Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, yang intinya bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan, mengubah perilaku, serta meningkatkan kualitas menjadi lebih baik (Fattah, 2012). Kualitas pendidikan suatu Negara ditentukan oleh kualitas lulusan dari sekolah. Jika hasil lulusan bagus maka akan sangat berpengaruh terhadap kesiapan anak di dunia kerja dan berpengaruh terhadap pendidikan secara umum (Yakubu, 2018).

Pendidikan Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal secara nasional, mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan bahwa hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang memenuhi delapan standar nasional pendidikan (SNP) (Kemdikbud, 2016).

Menurut Puspitasari (2018), tantangan eksternal yang dihadapi bangsa terletak pada arus globalisasi di semua aspek kehidupan, selain itu telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN semenjak tahun 2015, sehingga makin terbuka persaingan diantara negara-negara ASEAN. Data kualitas pendidikan di Indonesia ini muncul tentunya karena adanya sebab. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah masih kurang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Nuryahya (2018), dewasa ini semua lembaga pendidikan berorientasi pada mutu. Lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika input, proses, dan outcomenya dapat memenuhi persyaratan yang dituntut oleh pengguna jasa

pendidikan. Bila performanya dapat melebihi persyaratan yang dituntut oleh pengguna (*stakeholder*) maka dikatakan unggul. Sistem pendidikan nasional yang didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.

Mutu pendidikan atau mutu sekolah tertuju pada mutu lulusan. Mutu akademik lulusan merupakan kualitas pencapaian hasil yang tinggi dalam tes kemampuan akademik berupa hasil penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian nasional. Mutu pendidikan diartikan sebagai bentuk pelayanan, pelayanan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang terkait dengan fokus utama tertuju pada peserta didik. Mutu pendidikan terus mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan hasil pendidikan, dalam hal ini adalah lulusan yang mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sehingga sekolah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas lulusan agar mampu berdaya saing tinggi.

Dewasa ini pendidikan telah merebak hingga dipelosok negeri, namun memang tidak semua telah merasakan apa itu pendidikan. Pembangunan infrastruktur sekolah yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun swasta semakin membantu perkembangan pendidikan, bahkan di kota-kota besar semakin banyak bermunculan sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Pembangunan infrastruktur yang pesat juga harus diimbangi oleh terpenuhinya kualitas sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia yang dimaksud dapat meliputi komponen-komponen pendidikan yaitu guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, peserta didik, dan lainnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan

efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi.

Rendahnya kemampuan bersaing lulusan pendidikan sekolah banyak disebabkan oleh kualitas hasil lulusan yang belum sesuai dengan target lulusan, sehingga para lulusan masih sulit untuk bekerja karena persyaratan untuk diterima sebagai pegawai di suatu lembaga atau dunia usaha yang semakin hari semakin bertambah, diantaranya harus menguasai bahasa asing, komputer, dan kewirausahaan. Lulusan sekolah yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tiap tahun bertambah banyak, namun kemampuan bersaing dalam ujian pada umumnya masih rendah sehingga persentase mereka yang diterima dan bisa melanjutkan pendidikan hanya sedikit. Sehingga dapat dikatakan mutu pendidikan sering kali dilihat dari mutu lulusan, dan mutu lulusan sering kali dilihat dari prestasi akademik dan seberapa banyak lulusan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan bekerja. Hal tersebut memberikan tantangan tersendiri kepada sekolah untuk terus meningkatkan mutu lulusannya.

Pemerintah setiap daerah juga gencar untuk memberikan amanah kepada seluruh lembaga pendidikan untuk bisa menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas. Keunggulan lulusan yang diinginkan mencakup seluruh lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Sebab dengan memiliki lulusan yang berkualitas, akan membuat peserta didik mampu bersaing untuk memasuki sekolah unggulan yang ada di wilayahnya maupun di luar wilayahnya. Keseriusan setiap sekolah untuk menyiapkan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas tentunya untuk menekan angka ketidakkulusan yang terjadi di masing-masing sekolah.

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan

(SNP). Perbaikan mutu pendidikan harus segera dilakukan secara terus menerus dengan cara memperbaiki manajemen mutu pendidikannya. Organisasi-organisasi pendidikan memegang peranan awal dalam proses peningkatan mutu pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan tidak akan banyak berarti jika tidak disertai dengan penjaminan mutu pendidikan. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan tugas sekolah, sedangkan pemerintah pusat dan daerah bertugas memfasilitasi peningkatan mutu sekolah. Beberapa peraturan pemerintah sebagai turunannya juga mengamanatkan hal yang sama yaitu satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan baik tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi maupun pusat.

Sistem monitoring yang ada di sekolah merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan pemangku kepentingan. Semua pihak bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal secara berkelanjutan bukan hanya sekedar untuk memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pihak tertentu (Olufunke & Joseph, 2012). Sehingga dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud mendorong setiap satuan pendidikan untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI) agar dapat mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Adapun yang menjadi payung hukumnya adalah Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah.

Peningkatan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah.

Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.Maksud dari penjaminan mutu internal ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Menurut Sulaiman & Wibowo (2016), pemanfaatan hasil implementasi SPMI secara internal untuk peningkatan mutu pendidikan, menumbuhkan semangat bekerja lebih baik, membangkitkan kesadaran untuk membangun budaya mutu. Secara eksternal dimanfaatkan terkait dengan persiapan dalam menghadapi akreditasi nasional maupun internasional.

Implementasi SPMI secara internal bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam tahap perencanaan, temuan dalam SPMI akan dijadikan masukan untuk memperbaiki standar dan peningkatan kearah yang lebih baik serta dapat digunakan untuk menumbuhkan semangat bekerja yang lebih baik, membangkitkan kesadaran untuk membangun budaya mutu, sehingga akan terwujud perbaikan secara terus menerus (Asia, 2017).

Pada awal pelaksanaan SPMI ini hanya sekolah tertentu yang dipilih oleh LPMP untuk menjadi sekolah Model maupun sekolah imbas. Sekolah dengan



model ini, diharapkan menjadi percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan melakukan pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah lain hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019. Demi mencapai hal tersebut, secara bertahap pemerintah telah menjalankan program dan kegiatan pengembangan sekolah model melalui penyiapan fasilitator pengembangan sekolah model, workshop atau pelatihan sistem penjaminan mutu internal untuk sekolah model, pendampingan sekolah model dan pengimbasan serta monitoring dan evaluasi sekolah model.

Kegiatan pendampingan dilakukan untuk menguatkan dan membina sekolah model agar dapat mengimplementasikan SPMI, media pengimbasan SPMI bagi sekolah imbas serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan SPMI di sekolah model. Pendamping sekolah model merupakan fasilitator daerah yang sebelumnya telah dibekali oleh LPMP. Agar pelaksanaan pendampingan di sekolah dapat dilaksanakan optimal sesuai dengan tujuan pendampingan perlu didukung oleh bantuan pemerintah dalam bentuk pembiayaan pendampingan pada tingkat sekolah. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Sementara itu bagi sekolah yang tidak ditunjuk untuk menjadi sekolah model maupun sekolah imbas tetap melaksanakan program SPMI ini dengan biaya sekolah sendiri. Untuk pendampingan dilakukan oleh pengawas sekolah yang mana pengawas sekolah telah dibekali materi oleh LPMP, karena pengawas sekolah juga bertindak sebagai fasilitator untuk sekolah lain.

Hasil rapor mutu SMP Negeri 21 Malang pada tahun 2017 berdasarkan kriteria pencapaian diketahui bahwa standar yang sudah mencapai SNP masih belum ada. Standar yang masuk dalam kategori capaian menuju SNP 3 ada tiga standar, yakni standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana pendidikan. Standar kompetensi kelulusan, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pengelolaan pendidikan dan standar pembiayaan termasuk kategori capaian menuju SNP 4.

SMP Negeri 21 Malang berperan serta dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dengan berusaha memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PP nomor 19 tahun 2005, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Dalam upaya untuk memperoleh hasil pendidikan yang bermutu, sekolah sebagai penyelenggara pendidikan melakukan pengelolaan pendidikan yang bermutu pula. Cara-cara lama dalam pengelolaan pendidikan yang kurang memperhatikan faktor mutu dan kurang memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan yang seharusnya ditegakkan, perlu segera diperbaiki untuk menuju penyelenggaraan pendidikan yang berwawasan mutu dan keunggulan. Mutu yang baik hanya bisa dihasilkan oleh sekolah yang memiliki sistem manajemen mutu yang handal. Sistem penjaminan mutu pendidikan yang akan memastikan bahwa pengelolaan pendidikan dijalankan dengan standar mutu sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan paparan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 21 Malang?; 2) bagaimana hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 21 Malang?; 3) apa faktor penghambat dan

solusi dari permasalahan dalam implementasi program sistem penjaminan mutu internal di SMP Negeri 21 Malang?.

## **2. Kajian Teori**

### **2.1. Pendidikan**

Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, *Paedagogiek.Pais* berarti anak, *gogos* artinya membimbing/tuntunan, dan *iek* artinya ilmu. Jadi secara etimologi paedagogiek adalah ilmu yang membicarakan bagaimana memberikan bimbingan kepada anak. Dalam bahasa Inggris pendidikan diterjemahkan menjadi *education*. *Education* berasal dari bahasa Yunani *eduare* yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Dalam bahasa Jawa disebut “*Panggula Wentah*” yang artinya mengolah, membesarkan, mematangkan anak dalam pertumbuhan jasmani dan rohani.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Sejalan dengan definisi ini, dalam KBBI dikatakan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Di negara Indonesia, pendidikan bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. UU Nomor 20 Tahun 2003 dikatakan tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara eksplisit, dalam Kurikulum 2013 dikatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menciptakan peserta didik yang memiliki empat macam

kompetensi yaitu kompetensi-kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan.

Agenda pembangunan pendidikan suatu bangsa tidak akan pernah berhenti dan selesai. Ibarat patah tumbuh hilang berganti, selesai memecahkan suatu masalah, muncul masalah lain yang kadang tidak kalah rumitnya. Begitu pula hasil dari sebuah strategi pemecahan masalah pendidikan yang ada, tidak jarang justru mengundang masalah baru yang jauh lebih rumit dari masalah awal. Itulah sebabnya pembangunan bidang pendidikan tidak akan pernah ada batasnya. Selama manusia ada, persoalan pendidikan tidak akan pernah hilang dari wacana suatu bangsa. Oleh karena itu, agenda pembangunan sektor pendidikan selalu ada dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat suatu bangsa.

Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari tiga macam yaitu: pendidikan informal, pendidikan non-formal, dan pendidikan formal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diselenggarakan di dalam keluarga. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu seperti kursus-kursus. Biasanya, pendidikan ini bersifat vokasional, jangka pendek, dan fokus pada satu bidang tertentu. Sementara itu, pendidikan formal adalah pendidikan sekolah yang sistematis, terstruktur, dan berjenjang (Simarmata, 2015).

Pemerintah menyadari bahwa pendidikan, terutama pendidikan formal, merupakan investasi besar dalam mengembangkan bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan perlu bermutu. Disadari pula bahwa sebuah bangsa yang bermutu sangat tergantung pada mutu pendidikannya. Dengan kata lain, tinggi-rendahnya mutu suatu bangsa ditentukan oleh tinggirendahnya mutu pendidikan bangsa tersebut.

## 2.2. Mutu

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja) baik berupa barang maupun jasa. Pengertian mutu secara garis besar adalah

gambaran dan karakteristik menyeluruh dari produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasan pelanggan.

Definisi mutu dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi produsen dan sisi konsumen. Dari sisi produsen, seperti yang telah disebutkan Philip B. Crosby dalam Hadis (2014), suatu produk barang dikatakan bermutu apabila produk tersebut sesuai dengan standar. Dalam hal ini, standar ditetapkan oleh produsen. Pada dunia pendidikan, yang menjadi produsen adalah pemerintah dan penyelenggara satuan pendidikan. Pemerintah telah menetapkan delapan standar pendidikan nasional, yakni: 1). standar isi, 2). standar proses, 3). standar kompetensi lulusan, 4). standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5). standar pengelolaan, 6). standar pembiayaan, 7). standar sarana dan prasarana, dan 8). standar penilaian. Pada sisi konsumen, seperti yang dikemukakan oleh Edward Deming dan Feigenbaum dalam Hadis (2014), Deming mengatakan bahwa produk yang bermutu adalah produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Feigenbaum mengatakan bahwa produk yang bermutu adalah produk yang dapat memuaskan pelanggan. Di dunia pendidikan, yang menjadi pelanggan atau konsumen adalah peserta didik dan orang tuanya.

Mutu dalam pendidikan adalah evaluasi proses pendidikan yang meningkatkan kebutuhan untuk mencapai dan proses mengembangkan bakat para pelanggan (peserta didik), dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh klien (stakeholder) yang membayar untuk proses atau output dari proses pendidikan (Fadhli, 2017). Mutu (Kualitas) pendidikan bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan, jika suatu proses pendidikan berjalan baik, efektif dan efisien, maka terbuka peluang yang sangat besar memperoleh hasil pendidikan yang bermutu (Munjin, 2013).

Menurut Dharmamuda (2015), secara deskriptif mutu adalah keberhasilan tes hasil belajar siswa yang memenuhi standar ideal pendidikan. Sementara menurut

Fattah (2012), pengukuran ketercapaian standar acuan dan evaluasi mutu pendidikan dilakukan terhadap satuan/program pendidikan melalui : evaluasi diri satuan pendidikan, monitoring oleh pemerintah daerah, akreditasi, sertifikasi, ujian nasional dan pengumpulan data pangkalan data dan informasi. Ujian Nasional merupakan pengukuran ketercapaian standar acuan mutu pendidikan terkait dengan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan. Pengukuran tersebut akan menghasilkan tingkat kelulusan peserta didik secara nasional. Data yang diperoleh pada pengukuran ini adalah data kinerja dan prestasi peserta didik.

### 2.3. Standar Nasional Pendidikan

Setiap penyelenggara dan satuan pendidikan memerlukan suatu acuan dasar guna mewujudkan pendidikan nasional, yang meliputi kriteria berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar tersebut merupakan standar pendidikan untuk meningkatkan kinerja penyelenggara pendidikan sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas public. Standar pendidikan diharapkan dapat memacu penyelenggara atau pengelola satuan pendidikan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu (Barnawi, 2017).

Standar nasional pendidikan (SNP) adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas: 1) Standar Kompetensi Lulusan; 2) Standar Isi; 3) Standar Proses; 4) Standar Penilaian; 5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6) Standar Pengelolaan; 7) Standar Sarana dan Prasarana; dan 8) Standar Pembiayaan. Menurut Sani, dkk (2018), acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kedelapan standar pendidikan tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan output dalam SNP.

SKL akan mencapai skor yang tinggi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik.

Capaian standar nasional pendidikan masing-masing sekolah dapat dilihat dari hasil rapor mutu. Rapor Mutu sekolah adalah gambaran kondisi sekolah dalam upaya pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dengan indikator dan sub indikator yang berisi nilai dengan skala 1-7.

Rapor mutu dari hasil Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) membantu untuk mengidentifikasi masalah, penilaian program dan pencapaian sasaran. Sekolah dapat mengidentifikasikan kelebihan serta kekurangannya sendiri dan merencanakan pengembangan ke depan. Memperkuat budaya evaluasi kelembagaan dan analisis-diri. Mendorong sekolah untuk meninjau kembali kebijakan yang telah usang. Memberi informasi tentang status sekolah dibandingkan dengan sekolah lain. Sekolah dapat memiliki data dasar yang akurat sebagai dasar untuk pengembangan dan peningkatan di masa mendatang. Sekolah dapat mengidentifikasikan peluang dan tantangan untuk meningkatkan mutu pendidikan (Rudi, 2019)

#### 2.4. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan tentang penjaminan mutu pendidikan. Upaya penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah kemudian diimplementasikan ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Sesuai dengan Permendikbud No 28 Tahun 2016, disebutkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Pengertian lain, penjaminan mutu merupakan kegiatan untuk memberikan bukti-bukti sebagai upaya membangun kepercayaan bahwa mutu dapat berjalan secara efektif (Effendi, 2017).



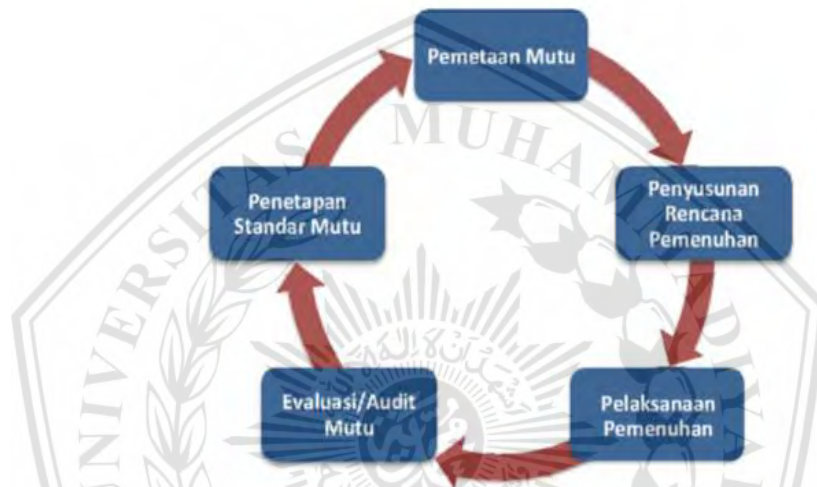
Menurut Barnawi (2017), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan bertujuan agar setiap warga Negara mendapatkan pendidikan dan pelayanan yang bermutu sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara. Oleh karena itu Penjaminan mutu menjadi sangat penting karena setiap lembaga ingin memuaskan pelanggannya. Tidak terkecuali pada dunia pendidikan yang juga ingin memuaskan peserta didik dan orang tuanya.

Adanya penjaminan mutu di sekolah sudah menjadi keharusan sebagai konsekuensi dari tuntutan masyarakat dan pemerintah. Menurut (Mariana, 2013), terdapat empat manfaat yang diperoleh sekolah dalam mengimplementasikan penjaminan mutu. Pertama, memfasilitasi sekolah agar siap menjadi lembaga otonom, demokratis, dan akuntabel dalam perencanaan, implemetasi, dan pengendalian program sekolah mengacu kepada dan mencapai standar minimal, yaitu delapan SNP sebagai standar minimal. Kedua, memfasilitasi sekolah dalam melaksanakan evaluasi diri sekolah (EDS) dan menyiapkan sekolah mencapai akreditasi yang tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional untuk Sekolah dan Madrasah. Ketiga, meningkatkan mutu layanan pembelajaran, profil belajar dan mengajar yang efektif, kreatif, dan menyenangkan peserta didik. Keempat, menginspirasi sumber daya pendidikan agar memiliki dorongan internal yang kuat, menjaga budaya mutu, dan senantiasa meningkatkan kemampuan profesional secara berkesinambungan.

Terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaan Sistem penjaminan mutu pendidikan, yakni 1) berkelanjutan dimana penjaminan mutu harus dilaksanakan secara terus menerus dalam siklus tertentu sehingga mutu maksimal dapat tercapai; 2) terencana dan sistematis, dimana penjaminan mutu, terkait dengan waktu, harus memiliki target-target yang jelas, terukur, dan dapat dicapai; 3) terbuka, artinya sistem yang diterapkan harus fleksibel sehingga dapat disempurnakan terus menerus mengikuti perkembangan zaman.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. Pelaksanaan SPMI dimaksudkan agar pemenuhan mutu dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara internal oleh satuan pendidikan (Sani, 2018).

Sistem penjaminan mutu internal ini dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan menengah dengan mengikuti siklus sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Sistem penjaminan mutu internal dapat berjalan dengan baik pada satuan pendidikan jika terdapat unsur penjaminan mutu di dalam manajemennya. Unsur penjaminan mutu tersebut dapat dalam bentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang merupakan tim independen di luar manajemen sekolah yang minimal berisi perwakilan pimpinan satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya serta komite di satuan pendidikan tersebut.

Ukuran keberhasilan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan terdiri dari indikator keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak. Indikator keluaran (*output*) yang diharapkan adalah satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu, berfungsinya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Indikator hasil (*outcome*) yang diharapkan adalah, proses

pembelajaran berjalan sesuai standar, pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai standar. Indikator dampak (*impact*) yang diharapkan adalah, budaya mutu di satuan pendidikan terbangun, mutu hasil belajar meningkat (Kemdikbud, 2017).

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas empiris sesuai fenomena secara rinci dan tuntas, serta untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2015).

#### **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Sesuai dengan judul, penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 21 Malang yang terletak di Jl. Danau Tigi, Lesanpuro, Kedungkandang, Kota Malang. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2019 sampai dengan Agustus 2019. Peneliti memilih tempat tersebut karena disana merupakan salah satu sekolah di kota Malang yang mempunyai banyak prestasi akademik dan non akademik. Selain itu, sekolah ini juga menjadi sekolah imbas dari sekolah model untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Dalam proses pelaksanaannya, sekolah imbas menggunakan biaya sendiri tanpa ada bantuan dari LPMP.

### 3.3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang akan dikumpulkan oleh penulis, yaitu sumber data pendukung dan peneliti sendiri. Sumber data dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, pengawas pembina dan tim penjaminan mutu di SMP Negeri 21 Malang. Data primer untuk penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Data sekunder yaitu data yang mendukung terhadap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

### 3.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan memperoleh data yang akurat adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu, pengamatan mengenai kondisi sekolah dan kegiatan-kegiatan di sekolah yang mendukung tercapainya budaya mutu.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dari pengawas pembina, kepala sekolah maupun tim penjaminan mutu sekolah.

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui bahan tertulis misalnya, catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya. Metode dokumentasi yang peneliti maksud adalah cara untuk memperoleh data-data yang terkait dengan judul peneliti yang berbentuk dokumen, baik dokumen pribadi maupun dokumen resmi (Nuryahya, 2018). Data-data dokumentasi yang akan peneliti kumpulkan

adalah data-data yang bersangkutan tentang sistem penjaminan mutu internal di SMP Negeri 21 Malang.

### 3.5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan untuk relevansi dan fokus pada data yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data kemudian menyusun dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram atau sejenisnya, sehingga akan memudahkan dalam menuturkan, menuliskan, menyimpulkan, dan menginterpretasikan data yang ada. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh serta dapat dipertanggung jawabkan.

### 3.6. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono (2015), Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber oleh peneliti dilakukan dengan cara data yang telah diperoleh dari salah satu informan divalidasi disilangkan terhadap informan lainnya. Kegiatan ini dilakukan terus menerus sampai didapatkan kecenderungan data sehingga data jenuh. Data dikatakan jenuh apabila tidak ada informasi baru yang didapatkan dari informan oleh peneliti. Adapun triangulasi teknik oleh peneliti dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber atau informan yang sama dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data tentang implementasi system penjaminan mutu internal untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 21 Malang, maka data yang telah

diperoleh peneliti selama wawancara dengan informan kemudian dicek dengan observasi dan pencermatan dokumentasi.

#### **4. Hasil Penelitian**

Adapun hasil penelitian tentang implementasi sistem penjaminan mutu internal untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 21 Malang sebagai berikut : 1) Bagaimanakah bentuk implementasi program Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 21 Malang?; 2) Bagaimana hasil sistem Penjaminan Mutu Internal dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 21 Malang?; 3) Apa faktor penghambat dan solusi dari permasalahan dalam implementasi program Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMP Negeri 21 Malang?.

##### **4.1 Implementasi Program Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Usaha Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 21 Malang.**

Sistem penjaminan mutu internal merupakan salah satu sistem penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dimaksudkan agar pemenuhan mutu dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara internal oleh satuan pendidikan. Sistem penjaminan mutu internal mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP. Satuan pendidikan menerapkan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu secara mandiri dan berkesinambungan hingga budaya mutu di satuan pendidikan dapat terbentuk. Budaya mutu akan mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus sehingga mutu pendidikan akan meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu secara bertahap hingga dipenuhinya standar yang telah ditetapkan atau bahkan melampaui standar tersebut.

SMP Negeri 21 Malang sudah mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal semenjak tahun 2016 dengan menjadi sekolah imbas dari SMP Negeri 22

Malang. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2019 SMP Negeri 21 Malang ditunjuk untuk menjadi sekolah model. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal ini tidak lepas dari peran serta seluruh komponen satuan pendidikan sehingga bisa menghasilkan lulusan yang berbudaya mutu. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Kepala Sekolah yang mengatakan bahwa:

Implementasi sistem penjaminan mutu internal sudah kami lakukan semenjak awal sistem penjaminan mutu internal bergaung yaitu tahun 2016 sampai saat ini. Kami melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dengan melibatkan seluruh komponen sekolah, karena tanpa kerjasama semua pihak budaya mutu yang sesuai SNP tidak mungkin bisa tercapai. Jadi di awal ketika sekolah kami ditunjuk untuk menjadi sekolah imbas, pertama yang kami lakukan yaitu membentuk tim penjaminan mutu sekolah untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan siklusnya, yaitu pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, implementasi pemenuhan mutu, evaluasi dan penetapan standar. Kami juga melakukan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk workshop kepada semua guru dan tenaga pendidikan terkait sistem penjaminan mutu internal agar memahami bagaimana prosesnya. (KS/07/08/2019).

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas yang telah dilakukan oleh peneliti kepada kepala sekolah, bahwa sekolah sudah melaksanakan sistem penjaminan mutu internal untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Upaya sekolah dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dilakukan mengikuti tahapan-tahapannya, yakni pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, implementasi pemenuhan mutu, evaluasi atau audit mutu dan penetapan standar. Pernyataan ini di perkuat dengan tanggapan dari guru yang berperan sebagai ketua tim penjaminan mutu sekolah yang telah di wawancarai oleh peneliti. Guru tersebut mengatakan bahwa :

Sekolah sudah melaksanakan sistem penjaminan mutu internal semenjak menjadi sekolah imbas sampai sekarang menjadi sekolah model. Semua komponen sekolah terlibat dalam sistem penjaminan mutu internal ini, mulai dari pengawas sekolah, kepala sekolah, komite sekolah, guru maupun tenaga administrasi. Kita semuanya bekerja bersama tim agar nantinya dapat meningkatkan mutu sekolah. Karena seperti kita ketahui mutu sekolah dapat



diukur dari 8 komponen SNP, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar proses, standar isi, standar penilaian, standar pendidikan dan tenaga pendidikan dan standar pembiayaan, yang mana setiap komponen standar tersebut saling berhubungan satu sama lain, jadi tidak bisa dikerjakan oleh individu saja. Kita melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan, mulai dari pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, implementasi pemenuhan mutu, evaluasi atau audit mutu dan penetapan standar.(KTPMS/07/08/2019).

Lebih lanjut terkait pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dijelaskan oleh penanggungjawab standar kompetensi lulusan seperti hasil wawancara berikut ini :

Proses pemetaan mutu diperoleh dari hasil rapor mutu, kemudian rapor mutu dianalisis dilihat standar kompetensi yang nilainya masih kurang, setelah itu dilakukan perencanaan pemenuhan mutu. Rencana pemenuhan mutu juga melihat dari prioritas program karena terkait dengan visi misi dan tujuan sekolah, selain itu juga dilihat urgensi nya untuk menyelesaikan permasalahan dengan segera agar tidak berdampak buruk pada kondisi yang lain. Langkah selanjutnya yaitu pemenuhan mutu yang didasarkan dari dokumen perencanaan pemenuhan mutu yang harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dan tahap terakhir yaitu evaluasi pemenuhan mutu untuk melihat tingkat keberhasilan program maupun untuk rekomendasi penyusunan program selanjutnya agar nantinya dapat memperbaiki mutu sekolah.(PSKL/07/08/2019).

Berdasarkan hasil dari studi dokumen dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 21 Malang sudah baik, pelaksanaannya sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dikerjakan bersama tim. Hal ini dibuktikan dengan beberapa informasi dari beberapa informan melalui wawancara dengan peneliti dan beberapa dokumen pendukung seperti rapor mutu yang mengalami kenaikan capaian dari tahun 2016 sampai tahun 2018, SK tim penjaminan mutu sekolah dan dokumen SPMI yang meliputi dokumen analisis pemetaan mutu, dokumen rencana pemenuhan mutu, dokumen implementasi pemenuhan mutu dan

dokumen evaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu sebagai tolak ukur untuk masa yang akan datang.

#### 4.2 Hasil Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Usaha Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 21 Malang.

Implementasi sistem penjaminan mutu internal memberikan dampak yang bagus dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 21 Malang. Hal ini terbukti dari hasil rata-rata nilai UNBK tahun pelajaran 2018/2019 yang memperoleh peringkat 4 sekolah negeri di kota Malang. Hasil rata-rata nilai UNBK juga mengalami kenaikan dibanding tahun pelajaran 2017/2018.



Gambar 4.1 Hasil rata-rata UNBK 10 besar SMP kota Malang tahun pelajaran 2017/2018. (<https://malangvoice.com/mbois-kota-malang-peringkat-1-unbk-smp-se-jawa-timur-zubaidah-kami-bangga/>)

PERINGKAT RATA-RATA UN TAHUN PELAJARAN 2018/2019						
NO	NAMA LEMBAGA	BN	KG	MAT	IPA	JME
1						
2	SMP NEGERI 3 MALANG	85.58	88.43	89.15	85.80	309.96
3	SMP NEGERI 5 MALANG	87.77	85.88	89.30	78.13	341.08
4	SMP NEGERI 1 MALANG	87.84	88.28	85.39	83.40	344.91
5	SMP NEGERI 21 MALANG	85.77	76.73	81.03	74.79	318.32
6	SMP NEGERI 6 MALANG	86.12	78.97	78.87	72.37	316.33
7	SMP NEGERI 8 MALANG	84.71	76.17	80.86	72.09	313.83
8	SMP NEGERI 4 MALANG	84.60	78.70	72.80	68.93	305.03
9	SMP NEGERI 20 MALANG	85.06	76.13	73.27	68.93	303.39
10	SMP NEGERI 2 MALANG	84.71	68.79	72.36	69.72	295.57

Gambar 4.2 Hasil rata-rata UNBK 10 besar SMP kota Malang tahun pelajaran 2018/2019.

Pada gambar 4.1 dan 4.2 terlihat lulusan SMP Negeri 21 Malang mengalami kenaikan dalam bidang akademiknya. Hal ini, sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala sekolah, yang menyatakan bahwa :

Dengan adanya sistem penjaminan mutu internal ini, kalau dilihat dari hasil lulusannya pada tahun ini sekolah kita meraih peringkat 4 tingkat SMP negeri se-kota Malang dan juga salah satu siswa kita hasil UNBK nya meraih peringkat 1 tingkat SMP se-kota Malang. Semua prestasi ini tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh warga sekolah. (KS/07/08/2019).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh ketua tim penjaminan mutu sekolah, yang menyatakan bahwa :

Setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis pukul 06.00 WIB, peserta didik kelas 9 mengikuti bimbel. Wali murid sangat mengapresiasi program ini. Demikian juga bapak ibu guru rela datang pagi untuk memberikan tambahan pelajaran kepada anak-anak. Tanpa dukungan dari semua pihak, tidak mungkin SMP Negeri 21 Malang bisa berhasil meraih peringkat 4 rata-rata hasil UNBK dan meraih peringkat 1 hasil UNBK. (KTPMS/07/08/2019).

Selain dilihat dari nilai hasil lulusan, hasil dari sistem penjaminan mutu internal ini juga berdampak pada budaya mutu peserta didik. Hal ini terlihat dari program pembiasaan yang diterapkan di SMP Negeri 21 Malang, seperti pernyataan yang disebutkan oleh waka kurikulum yang sekaligus masuk dalam tim penjaminan mutu sekolah sebagai berikut :

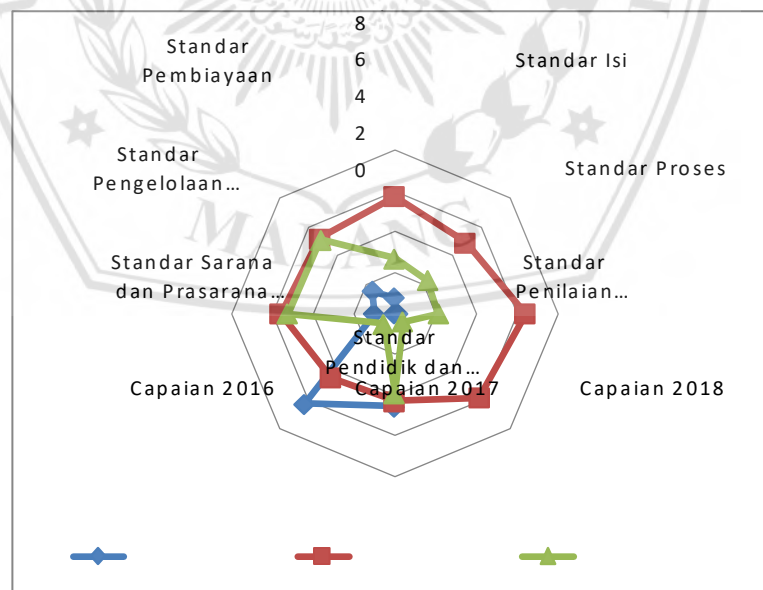
Setiap pagi ada kegiatan pembinaan Imtaq kemudian dilanjutkan dengan wawasan kebangsaan cinta tanah air dan kegiatan literasi. Kegiatan diikuti oleh seluruh peserta didik, dilaksanakan pagi hari pukul 06.45 – 07.15 di halaman

sekolah. Anak-anak datang langsung menuju ke halaman belakang dan langsung duduk dengan alas yang dibawa masing-masing. Kemudian dipandu oleh siswa yang sudah ditunjuk untuk membaca surat-surat pendek dan asmaul husna, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan dan yang terakhir dilakukan kegiatan literasi dimana anak-anak membawa buku sendiri-sendiri. Dengan adanya kegiatan literasi ini diharapkan dapat mendorong anak-anak untuk memiliki perilaku pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan hasil analisis pemetaan mutu kami. (WK/07/08/2019)

Lebih lanjut waka kurikulum juga menyebutkan bahwasanya dalam setiap kegiatan pembelajaran semua guru melaksanakan penilaian sikap yang nantinya berdampak pada kualitas lulusan yang baik. Hal tersebut diungkapkan dalam pernyataan berikut :

Pada saat pembelajaran di dalam kelas karena kita menerapkan kurikulum 2013 selain dilakukan penilaian pengetahuan juga dilakukan penilaian sikap. Jadi perilaku anak-anak akan terkontrol dengan baik. Sementara di luar kelas tetap ada pantauan dari tim tatib terkait perilaku anak-anak. (WK/07/08/2019)

Sistem penjaminan mutu internal sudah diterapkan di SMP Negeri 21 Malang, namun hasil dari rapor mutu tahu 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017. Hal ini tampak pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Hasil Radar Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2018.

Dari hasil radar penjaminan mutu pendidikan capaian untuk tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tim penjaminan mutu pendidikan sekolah disebutkan bahwa :

Hasil penjaminan mutu pendidikan mengalami penurunan di 2018, penyebabnya karena terkendala *upload* data dan pada saat proses pengisian server di LPMP down, sehingga ada beberapa data yang tidak bisa ter-*upload* dengan baik dan menyebabkan banyak indikator di rapor mutu yang berwarna merah. Namun setelah divalidasi oleh tim penjaminan mutu pendidikan sekolah, kita bisa memetakan mana yang seharusnya sudah memenuhi mutuan mana yang belum. Hasil dari validasi banyak nilai dari rapor mutu yang tidak sesuai dengan kondisi di sekolah. (TPMPS/07/01/2020)

Organisasi penjaminan mutu berfungsi dengan baik mengakibatkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan baik. Hasilnya proses pembelajaran berjalan sesuai standar dan pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai standar. Dampak dari implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di tingkat sekolah adalah mutu hasil belajar meningkat dan budaya mutu yang baik akan tertanam pada lulusannya.

#### **4.3 Faktor Penghambat dan Solusi dari Permasalahan dalam Implementasi Program Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMP Negeri 21 Malang.**

Proses pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di SMP Negeri 21 Malang tidak berjalan lancar-lancar saja, namun tetap ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam rangka mencapai sekolah yang berbudaya mutu. Beberapa faktor ini sangat mempengaruhi pelaksanaan SPMI dalam meningkatkan mutu pendidikan. Faktor penghambat ini juga mempengaruhi hasil rapor mutu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Sekolah, yang menyatakan bahwa :

Memang ada beberapa kendala atau faktor yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini, seperti ketidaktersediaan tenaga pustakawan dan tenaga laboran yang sesuai dengan ketentuan yang akhirnya berdampak pada proses pemenuhan mutu tidak dapat berjalan dengan baik karena tenaga pustakawan dan tenaga laboran dipegang oleh guru yang bukan ahlinya. Tetapi, kami berusaha untuk pustakawan, meskipun diambil dari guru yang notabenenya tugasnya mengajar, kami mengurangi

jam pembelajaran guru tersebut menjadi 12 jam pelajaran dan untuk kepala perpustakaan di dapodik diakui 12 jam pelajaran, sehingga guru tersebut tetap memenuhi 24 jam pelajaran, sehingga guru tersebut bisa melaksanakan tugas di perpustakaan dengan dibantu tenaga administrasi. Sementara untuk tenaga laboran sebenarnya sekolah berkeinginan untuk mencari yang ahli di bidangnya, namun terkendala oleh pembiayaan pada saat proses pemenuhan mutu, karena tenaga laboran yang diperlukan sekolah ada 3 jenis, yaitu tenaga laboran IPA, tenaga laboran bahasa, dan tenaga laboran komputer. Seperti tenaga teknisi komputer hanya kami panggil pada saat mendekati ujian berbasis komputer.(KS/07/08/2019).

Beberapa faktor yang dijelaskan kepala sekolah memang menjadi faktor yang secara umum mempengaruhi hasil rapor mutu sekolah. Selain itu, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi sistem penjaminan mutu internal seperti kurangnya sarana pendukung dalam proses meningkatkan mutu sekolah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu tim penjaminan mutu sekolah, yang menyatakan bahwa :

Mungkin faktor yang menjadi kendala dalam implementasi SPMI ini salah satunya karena kurang pahamnya kita untuk menyesuaikan perencanaan mutu dengan rencana kerja sekolah. Selain itu juga terkait dengan pembiayaan, karena sekolah mendapatkan dana hanya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kita ketahui bersama bahwasanya penyusunan RKA BOS dilakukan 1 tahun sebelum pelaksanaannya, sehingga pada saat proses perencanaan pemenuhan mutu harus disesuaikan juga dengan RKA yang telah dibuat. Selain itu juga ketersediaan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah juga masih belum sesuai ketentuan, misal seperti jumlah kamar mandi yang tidak sesuai dengan kapasitas jumlah siswa.(TPMS/07/08/2019).

Hal serupa juga dinyatakan salah satu tim penjaminan mutu sekolah dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa:

Tidak semua program sekolah dibiayai oleh BOS, misal bimbel yang diberikan kepada peserta didik kelas 9. Bimbel merupakan salah satu program sekolah untuk meningkatkan mutu dari peserta didik kelas 9, agar nantinya peserta didik memperoleh nilai yang terbaik untuk ranah pengetahuannya. Karena biaya bimbel tidak tercover di RKA, maka peran komite diperlukan untuk kelancaran program tersebut.(TPMS/07/08/2019).

Selain beberapa faktor diatas, juga ada faktor yang menghambat implementasi SPMI yakni pada saat proses pemetaan mutu. Hal ini sesuai dengan hasil

wawancara yang dilakukan peneliti terhadap ketua tim penjaminan mutu sekolah, yang menyatakan bahwa :

Pemetaan mutu dilakukan secara online dengan mengisi aplikasi perangkat instrumen pemetaan mutu. Pengisiannya dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas pembina, guru, peserta didik kelas 7, 8 dan 9, juga komite sekolah. Karena jumlah pertanyaan dalam kuesioner tersebut banyak, dan sering kali sambungan internet tidak lancar, sehingga pada saat pengisian adakalanya merasa jenuh dan akhirnya menjawab ala kadarnya, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Padahal idealnya pengisian instrumen dilakukan dengan benar bukan hanya sekedar mengisi formulir, sehingga mengakibatkan hasil rapor mutu kurang bagus dan tidak sesuai dengan kondisi riil di sekolah. Untuk itu pada tahun ini pengisian instrumen peningkatan mutu pendidikan dilakukan oleh operator dapodik, namun sebelumnya daftar pertanyaan sudah diisi oleh masing-masing orang yang telah ditunjuk. Harapannya tidak mengganggu tugas dan jawaban sesuai kondisi di sekolah. (KTPMS/07/08/2019).

Berdasarkan wawancara dan studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti, maka faktor-faktor yang menghambat implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu pendidikan menjadi perhatian khusus oleh pihak sekolah yang kemudian di tuangkan dalam rencana kerja sekolah (RKS) melalui analisis laporan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan pada masa yang akan datang dan memang menjadi kendala yang nyata dalam mengembangkan sekolah yang bermutu.

## **5. Pembahasan**

### **5.1 Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap telaah data yang telah dipaparkan pada hasil penelitian. Maka, peneliti menguraikan data dengan berpedoman pada teori-teori yang relevan. Penelitian ini berfokus pada “implementasi sistem penjaminan mutu internal untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 21 Malang”. Kemudian peneliti menjabarkan melalui sub-sub pada rumusan masalah.



## **5.2 Implementasi Program Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Usaha Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 21 Malang**

Pada dunia pendidikan, para pendidik tidak boleh menghasilkan lulusan yang tidak baik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu lulusan adalah mewajibkan satuan pendidikan untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan dengan tujuan supaya satuan pendidikan dapat memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Tanpa pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, maka upaya peningkatan mutu pendidikan tidak diketahui efektivitasnya. Oleh sebab itu penjaminan mutu (quality assurance) harus dilakukan sejak awal proses pendidikan.

Setiap satuan pendidikan harus menerapkan sistem penjaminan mutu untuk menjamin terwujudnya kualitas dalam setiap tahapan kegiatan sekolah, yaitu: input, proses, dan output pengelolaan sekolah. Apabila terjadi kesalahan dalam input dan proses pengelolaan pendidikan, maka harus segera dilakukan perbaikan sehingga proses dan hasil pendidikan menjadi lebih optimal. Jika proses pendidikan tidak dilakukan secara optimal dan memenuhi standar, maka kompetensi lulusan juga tidak akan dapat dijamin mutunya.

Sistem penjaminan mutu internal dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Dalam upaya penjaminan mutu sekolah, kepala sekolah harus membentuk sebuah tim yang membantunya dalam melakukan penjaminan mutu, karena sebuah proses pendidikan merupakan proses yang kompleks. Akan sangat sulit bagi seorang kepala sekolah untuk menjamin bahwa proses pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan yang dikelolanya merupakan proses yang

memenuhi mutu sesuai dengan standar yang dijanjikan jika tidak didukung oleh kinerja yang optimal dari semua komponen sekolah. memiliki tim penjaminan mutu sekolah (TPMS) yang memastikan untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi siklus pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tingkat sekolah.

Sistem penjaminan mutu internal merupakan suatu kegiatan yang sistematis yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan itu sendiri secara berkelanjutan untuk mencapai standar nasional pendidikan dan kepuasan para pelanggan (Asia, 2017). Implementasi SPMI di SMP Negeri 21 Malang dilaksanakan sebagai suatu keharusan dan merupakan kegiatan mandiri, sehingga proses penjaminan mutu dirancang, dilaksanakan, dikendalikan, dan dievaluasi sendiri oleh satuan pendidikan, karena mutu tidak hanya tergantung pada pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab satuan pendidikan.

Pelaksanaan SPMI di SMP Negeri 21 Malang mengikuti prosedur yang ada pada panduan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Diawali dengan sosialisasi kepala sekolah kepada warga sekolah melalui kegiatan workshop dengan pemateri SPMI dilakukan oleh pengawas sekolah selaku fasilitator daerah yang ditunjuk oleh LPMP. Kemudian kepala sekolah membentuk tim penjaminan mutu sekolah (TPMS). TPMS terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru, komite sekolah dan tenaga administrasi. Kepala sekolah membuat surat keputusan TPMS beserta deskripsi pembagian tugas dan panduan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Adapun tahapan SPMI terdiri dari 5 tahap, yaitu : 1) pemetaan mutu; 2) penyusunan rencana pemenuhan mutu; 3) pelaksanaan pemenuhan mutu; 4) evaluasi dan audit pemenuhan mutu dan 5) penetapan standar mutu (Asia, 2017).

Penetapan standar dirumuskan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Standar yang ditetapkan dalam implementasi sistem penjaminan mutu

internal di SMP Negeri 21 Malang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP).

Pemetaan mutu dilakukan berdasarkan hasil analisis dari rapor mutu. Di awal dilakukan evaluasi diri sekolah (EDS) melalui pengisian aplikasi instrumen penjaminan mutu pendidikan yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengisian dilakukan oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, peserta didik dan komite sekolah. Pada proses pengisian disesuaikan dengan kondisi riil sekolah. Hasil dari pengisian aplikasi instrumen PMP tersebut adalah rapor mutu. Kemudian TPMS berdiskusi mengidentifikasi indikator pada tiap standard dan menganalisisnya dilanjutkan dengan rekomendasi perbaikan. Pada kegiatan ini, satuan pendidikan mendiskusikan hasil analisis untuk menentukan rekomendasi apa yang dapat diajukan untuk meningkatkan pencapaian standar mutu. Pemetaan mutu diperoleh dari hasil analisis keseluruhan tiap standard. Peta mutu yang dihasilkan berdasarkan data riil yang ada di sekolah.

Penyusunan rencana pemenuhan mutu pada satuan pendidikan didasarkan pada hasil evaluasi diri sekolah yang dianggap urgen, kebijakan pemerintah, serta visi, misi dan kebijakan sekolah. Bentuk dari kegiatan ini adalah dokumen rencana kerja sekolah dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Dalam penyusunan dokumen rencana pemenuhan mutu dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, karena pada tahap ini perencanaan biaya juga sudah tampak di dokumen. Menurut Sani, dkk (2018), tahapan penyusunan rencana pemenuhan mutu dapat dilakukan mengikuti 4 langkah, yaitu penentuan kondisi satuan pendidikan saat ini, penentuan kondisi satuan pendidikan yang diharapkan, penyusunan program dan kegiatan dan perumusan rencana anggaran satuan pendidikan.

Pelaksanaan pemenuhan mutu merupakan realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu

sekolah. Pelaksana dari implementasi pemenuhan mutu adalah seluruh komponen sekolah dan memiliki komitmen untuk melaksanakannya secara maksimal agar hasilnya minimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini standar nasional pendidikan (SNP). Pada tahap ini lebih ditekankan pengelolaan dan proses belajar mengajar di sekolah.

Menurut Sani, dkk (2018), evaluasi pemenuhan mutu merupakan tahapan pengujian yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah pelaksanaan dan hasil pemenuhan mutu sesuai dengan strategi yang direncanakan dan apakah strategi tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan. Di SMP Negeri 21 Malang sudah terbentuk tim evaluasi dan audit internal. Mereka bertugas mempersiapkan instrumen monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang diadakan dan memberikan rekomendasi strategi pemenuhan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari seluruh tim penjaminan mutu sekolah agar nantinya ada jaminan kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Implementasi sistem penjaminan mutu internal di SMP Negeri 21 Malang pada umumnya sudah berjalan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah yang sudah dapat menjalankan SPMI dapat meningkatkan mutu dari sekolah tersebut. Karena pada dasarnya sesuatu dikatakan bermutu jika sudah mencapai spesifikasi yang telah ditetapkan (Sallis, 2011). Menurut Puspitasari (2017), sistem penjaminan mutu internal menjadikan sekolah sebagai pelaku utama atau ujung tombak penjaminan mutu pendidikan. Mutu pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab dari seluruh warga sekolah.

### **5.3 Hasil Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Usaha Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 21 Malang**

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya peningkatan mutu ini menjadi penting dalam rangka menjawab berbagai

tantangan terutama globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pergerakan tenaga ahli yang sangat masif. Maka persaingan antarbangsa pun berlangsung sengit dan intensif sehingga menuntut lembaga pendidikan untuk mampu melahirkan output pendidikan yang berkualitas, memiliki keahlian dan kompetensi profesional yang siap menghadapi kompetisi global.

Pada era teknologi informasi, guru bukanlah satu-satunya sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Tapi peran guru telah berubah menjadi fasilitator, motivator dan dimasitator bagi peserta didik. Dalam kondisi seperti itu diharapkan guru dapat memberikan peran lebih besar. Dengan kata lain peran pendidik tidak dapat digantikan oleh siapa pun dan apa pun serta era apa pun. Untuk melaksanakan peran tersebut secara efektif maka perlu ditingkatkan scenario yang jelas.

Sistem penjaminan mutu internal menurut Permendikbud No. 28 tahun 2016 berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Sekolah sebagai satuan pendidikan wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu internal ini, karena tanpa pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, maka upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat diketahui efektivitasnya. Penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Upaya pemenuhan standar mutu dilakukan secara bertahap dan kontinyu.

Tahapan untuk mencapai budaya mutu harus dimulai dengan penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan. Jika penjaminan mutu dilakukan secara benar, maka akan terdapat peningkatan mutu proses pendidikan di satuan pendidikan. Indikator peningkatan mutu yang paling nyata adalah peningkatan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar atau prestasi peserta didik. (Sani, dkk, 2018).

Dari hasil observasi dokumen sistem penjaminan mutu sudah berjalan sesuai Permendikbud No. 28 tahun 2016. Hal ini tampak pada kelengkapan dokumen

sistem penjaminan mutu internal. Meskipun hasil rapor mutu tahun 2018 mengalami penurunan bila dibandingkan hasil rapor mutu tahun 2017, namun dari hasil validasi tim penjaminan mutu sekolah menunjukkan banyak terjadi ketidakvalidan dari hasil rapor mutu tersebut.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu di SMP Negeri 21 Malang ini terlihat dari nilai akademis lulusan yang memperoleh nilai rata-rata hasil ujian nasional peringkat 4 se-kota Malang, juga mendapatkan peringkat 1 hasil UNBK se-kota Malang. Karakter yang bagus juga dimiliki oleh peserta didik karena setiap hari sudah dilakukan kegiatan pembiasaan, baik pembiasaan Imtaq, cinta tanah air, literasi maupun cinta lingkungan. Semuanya tidak terlepas dari peran serta seluruh warga sekolah yang sudah melaksanakan penjaminan mutu agar nantinya lulusan dari SMP Negeri 21 Malang memiliki lulusan yang berbudaya mutu. Sekolah yang berbudaya mutu akan dapat memenuhi SNP, sehinggalah satuan pendidikan tersebut akan ditemukan pembelajaran yang menyenangkan. Dampak dari proses pembelajaran seperti itu adalah dihasilkannya lulusan yang berkarakter baik, kreatif, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. (Sani, dkk, 2018).

#### **5.4 Faktor Penghambat dan Solusi dari Permasalahan dalam Implementasi Program Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMP Negeri 21 Malang**

Tidak sedikit lembaga pendidikan yang menerapkan sistem penjaminan mutu SPMI, tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Program penjaminan mutu telah dilaksanakan, perangkatnya telah disiapkan, dokumennya telah dibangun, investasi jutaan rupiah telah dikeluarkan, namun perbaikan mutu yang diharapkan tidak kunjung dapat dirasakan dan tidak ada perubahan signifikan, bahkan tragisnya semua pelaksana menjadi apatis.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 21 Malang. Faktor-faktor tersebut menjadi perhatian yang harus dicari

solusi untuk memperlancar proses dan tidak jadi penghambat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Faktor-faktor yang dimaksud seperti kondisi keuangan, tenaga kependidikan dan sarana prasarana sekolah yang dapat menunjang peningkatan mutu sekolah. Tetapi, hal ini tidak menjadi penghalang utama dalam meningkatkan mutu pendidikan, karenanya kepala sekolah dan tim penjaminan mutu sekolah harus mempunyai solusi dan inisiatif dalam menghadapi keterbatasan ini.

Perencanaan program-program yang tanpa memerlukan biaya bisa menjadi solusi alternatif dalam menghadapi keterbatasan pengelolaan keuangan yang dimiliki lembaga pendidikan seperti sekolah. Penyusunan RKA dilakukan di awal tahun, sementara pelaksanaan evaluasi diri sekolah dan perencanaan pemenuhan mutu dilakukan pada saat pertengahan tahun. Hal ini berakibat sulit untuk mencapai mutu pendidikan yang bagus. Maka dari itu sekolah perlu menggandeng masyarakat untuk terlibat dalam menyukseskan program sekolah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, merupakan dasar untuk menumbuhkan kesadaran dan menggali sumber dana dengan membangun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan pembiayaan yang ditetapkan merupakan dasar untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan; menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan; meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan; pelayanan pendidikan; dan menggali sumber dana dengan membangun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. (Kurniady, 2011).

Factor sarana dan prasarana yang mempengaruhi hasil dari rapor mutu yaitu jaringan internet. Pada saat proses pengiriman data secara online, tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, harus dipikirkan baik-baik dalam pengisian datanya. Selain itu, faktor sarana dan prasarana sekolah seperti jumlah kamar mandi siswa yang terbatas menjadi sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas sekolah. Rasio jumlah siswa dengan jumlah kamar mandi siswa tidak

seimbang. Keterbatasan ini memberikan efek bagi pelaksanaan program sekolah. Untuk itu sekolah berusaha mengajukan dana ke pemerintah. Sekolah harus dapat menyusun berbagai strategi pembiayaan dalam rangka mencapai tujuan sekolah dan mutu pendidikan. Pentingnya perencanaan strategi pembiayaan sekolah dalam meningkatkan mutu perlu diketahui, disadari, dan ditinjau ulang oleh pihak-pihak terkait sehingga membawa perubahan positif bagi keberlangsungan dan pencapaian tujuan sekolah. (Tius, Margareta, & Ismanto, 2017)

Keterbatasan adanya tenaga kependidikan yang kurang kompeten karena tidak sesuai dengan bidangnya juga akan memperburuk mutu pendidikan. Sekolah berusaha mencari tenaga laboran yang kompeten, namun terkendala biaya dan aturan daerah yang baru, dimana sekolah tidak diperbolehkan mengangkat tenaga kependidikan yang baru. Akhirnya sekolah memberdayakan tenaga yang ada, yang sekiranya kompetensinya mendekati kompetensi yang sesuai standar, yakni guru IPA. Standar kualifikasi dan standar kompetensi laboran yaitu diatur dalam Permendiknas nomor 26 tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah. Pada dasarnya baik pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki peran dan tugas yang sama yaitu melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan siswa dalam belajar. (Lubis, 2017).

Dari sini tampak bahwasanya semua standar yang ada di standar nasional pendidikan saling berhubungan satu sama lain. Input nya merupakan standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan dan standar sarana dan prasarana. Prosesnya terdiri atas standar isi, standar proses dan standar penilaian. Untuk outputnya standar kompetensi lulusan. Jadi jika seluruh standar sudah terpenuhi, maka sekolah tersebut bisa dikatakan sekolah yang bermutu. Standar nasional pendidikan adalah sebagai dasar pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. (Lubis, 2017)



## 6. Kesimpulan dan Saran

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa sistem penjaminan mutu internal di SMP Negeri 21 Malang sudah di implementasikan, ditunjukkannya SMP Negeri 21 Malang sebagai sekolah imbas yang kemudian berikutnya ditunjuk sebagai sekolah model merupakan bentuk adanya system penjaminan mutu internal di sekolah. Pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, evaluasi atau audit mutu dan penetapan standar dilakukan sebagai tolak ukur sistem penjaminan mutu internal di sekolah.

*Kedua*, bahwa hasil dari sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan di SMP Negeri 21 Malang mendapatkan bentuk hasil yang positif ditandai dengan mutu hasil lulusan pada ranah kognitif yang semakin baik yang dibuktikan dengan hasil lulusan yang meraih peringkat ke 4 rata-rata hasil ujian UNBK. Budaya mutu pada peserta didik juga sudah tampak melalui program pembiasaan seperti imtaq, wawasan kebangsaan dan kegiatan literasi yang dilakukan pada pagi hari dan di ikuti seluruh peserta didik. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran semua guru melakukan penilaian sikap untuk mengontrol perilaku anak-anak. Selanjutnya hasil dari rapor mutu penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 21 Malang meskipun banyak yang dibawah dari capaian SNP dan cenderung turun dari tahun sebelumnya, namun dari hasil validasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya di sekolah.

*Ketiga*, bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam pengimplementasian sistem penjaminan mutu internal di SMP Negeri 21 Malang diantara faktor-faktor dan solusi tersebut adalah tidak adanya tenaga pustaka dan tenaga laboran yang sesuai ketentuan sehingga kedua tenaga ini di pegang oleh guru. Kemudian faktor-faktor lainnya adalah masalah pembiayaan selama proses pemenuhan mutu, sarana dalam proses meningkatkan mutu karena tidak semua di

biayai oleh pihak sekolah yang hanya mendapatkan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga sekolah berusaha untuk mencari dana dari pemerintah maupun dari pihak luar. Selain itu, pada proses pengisian instrumen mutu juga menjadi salah satu faktor penghambat karena dilakukan secara online dan terkadang secara teknis ada gangguan jaringan sehingga proses pengisian instrumen terganggu yang berakibat hasil rapor mutu tidak sesuai dengan kondisi di sekolah, untuk itu sekolah berusaha semaksimal mungkin pada saat pengisian instrumen dengan mengisi di awal, dan mencari waktu yang longgar agar pada saat pengisian bisa focus.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, pengimplementasian sistem penjaminan mutu internal diharapkan terus dilakukan oleh pihak sekolah dengan harapan akan terciptanya sekolah yang mengedepankan kualitas pendidikan dan budaya sekolah yang baik yang berpatokan pada standar yang ada.

*Kedua*, pihak sekolah terus melakukan evaluasi hasil penjaminan mutu sebagai upaya dalam memperbaiki masalah-masalah yang timbul pada lembaga baik internal maupun eksternal dengan tujuan untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan.

*Ketiga*, pihak sekolah dan para *stakeholder* ikut berpartisipasi dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan salah satunya melalui sistem penjaminan mutu internal pada lembaga pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arowana, Anja. (2018). Mbois! Kota Malang Peringkat 1 UNBK SMP se-Jawa Timur, Zubaidah: Kami Bangsa.  
<https://Malangvoice.Com/Mbois-Kota-Malang-Peringkat-1-Unbk-Smp-Se-Jawa-Timur-Zubaidah-Kami-Bangga/>(Diakses Pada 8 Januari 2020 Pukul 20.24)
- Asia. (2017). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMP Negeri 3 Palu, 1–11.
- Barnawi dan Arifin, M. (2017). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Yogyakarta : Arruz Media.
- Dhartamuda, S. A. (2015). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Studi Kasus Pada Yayasan Bahana Cita Persada Kota Malang)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Effendi, Alwan. (2017). Manajemen Mutu Pendidikan. Yogyakarta : Media Akademi.
- Fadhli, M. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Studi Manajemen Pendidikan*, 1(02).
- Fattah, Nanang. (2017). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadis, Abdul & Nurhayati. (2014). Manajemen Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Kemdikbud. (2016). *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta.
- Kemdikbud. (2017). *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan*. Jakarta.
- Kurniady, D. A. (2011). pengelolaan pembiayaan sekolah dasar di kabupaten bandung. *Penelitian Pendidikan*, 12(1), 34–51.
- Lubis, A. N. S. dan W. (2017). Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. *EducanduM*, X, 1–12.
- Mariana, I. M. A. (2013). *Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Denpasar.

- Munjin. (2013). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Di Madrasah. *Dakwah & Komunikasi*, 7(2).
- Nuryahya, E. M. (2018). *Manajemen Penjaminan Mutu Internal Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Hikmah Surabaya)*.
- Olufunke, I., & Joseph, S. (2012). Quality Assurance and Effectiveness of Lagos State Junior Secondary Schools. *International Journal of Humanites and Social Science*, 2(15), 166–170.
- Puspitasari, H. (2017). Standar Proses Pembelajaran Sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Sekolah. *Muslim Heritage*, 1, 339–368.
- Rudi. (2019). Manfaat Rapor Mutu Hasil Pmp Bagi Sekolah. [Http://Vloggerpedia.Blogspot.Com/2019/10/Manfaat-Rapor-Mutu-Hasil Pmp-Bagi.Html](http://Vloggerpedia.Blogspot.Com/2019/10/Manfaat-Rapor-Mutu-Hasil-Pmp-Bagi.Html) (Diakses Pada 5 November 2019 Pukul 10.10)
- Sallis, E. (2011). *Total Quality Management In Education : Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sani, dkk. (2018). Sistem Penjaminan Mutu Internal. Tangerang: Tira Smart.
- Simarmata, J. (2015). Analisis Implementasi Penjaminan Mutu Di SMA Negeri 3 Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 15(4), 54–62.
- Sudarsana, I. K. (2015). Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(Volume 1 Nomor 1 Pebruari 2015), 1–14. <https://doi.org/10.25078/jpm.v1i1.34>
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Sulaiman, A., & Wibowo, U. B. (2016). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada. *Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(1), 17–32.
- Tius, R., Margareta, E., & Ismanto, B. (2017). Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri. *Manajemen Pendidikan*, 4(2), 195–204.
- Yakubu, U. S. L. and M. A. (2018). Quality Assurance Practice And Instructional Delivery Among Secondary School Civic Education Teachers In Kaduna State,

Nigeria. *British Journal of Education*, 6(3), 41–56.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017 Tentang Guru.

Undang -undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003.

